
Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kota Meulaboh Oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat

Mawardani. AN¹, Cut Devi Maulidasari²

^{1,2}Universitas Teuku Umar

E-mail: mawar121101@gmail.com¹, cutdevimaulidasari@utu.ac.id²

Article History:

Received: 28 Juni 2022

Revised: 30 Juni 2022

Accepted: 30 Juni 2022

Keywords: Management, Parking, West Aceh District Transportation Office

Abstract: *The increasing population in Indonesia makes the number of means of transportation used by the community also increases, causing the flow of vehicles on the highway to increase. The purpose of this study is to see the importance of the role of the Dishub of West Aceh Regency in managing parking on the edge of public roads so that it can be seen whether the role of Dishub can increase PAD in the city of Meulaboh. This research was conducted through a descriptive approach. The use of data collection techniques is done by means of interviews, observation, and documentation. The results show that the role of Dishub has not been able to increase the community's PAD. The strategy that can be done is that Dishub needs to manage and supervise the formation of 8 regional points in the City of Meulaboh to manage parking on the edge of the public in collaboration with 62 parking attendants for the Meulaboh community. In addition, facilities and infrastructure are proposed as a form of providing facilities for parking attendants, namely parking clothes/vests, name bests, and parking facilities.*

PENDAHULUAN

Perubahan era globalisasi yang berkembang begitu cepatnya, menuntut setiap masyarakat untuk dapat menyesuaikan dirinya terhadap mobilitas yang semakin maju di aktivitas kehidupan sosialnya. Hal ini menjadi suatu alasan bagi masyarakat perlu menggunakan fasilitas transportasi guna menjalankan aktivitas kehidupannya yang lebih efisien (Pribadiono, 2016). Perkembangan dunia transportasi di era ini, manusia memerlukan peran dari suatu lembaga untuk menghubungkan berbagai perjalanan yang mereka jalani, salah satu lembaga tersebut adalah Dinas Perhubungan. Dinas perhubungan diperlukan guna melakukan penyelenggaraan dalam perencanaan, pembinaan, pemberian sarana prasarana dan menyusun serta menetapkan jaringan transportasi, tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam melaksanakan aktivitas perjalanannya (Nurhasanah, 2017). Pengelola pelayaran yang sering dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas adalah pemberian akses sarana prasarana parkir.

Menurut (Hidayat & Machali, 2012) keadaan masyarakat saat ini menunjukkan perkembangan yang begitu dinamis dan selalu menyesuaikan dirinya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mengalami

empowering yang begitu baik. Selaras dengan perkembangan itu, pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat membuat jumlah alat transportasi yang digunakan masyarakat juga semakin bertambah sehingga menyebabkan arus kendaraan di jalan raya bertambah padat. Persoalan ini juga dirasakan oleh masyarakat Aceh, pertumbuhan penduduknya yang signifikan membuat Dinas Transportasi perlu analisis strategi penataan transportasi dengan baik melalui peningkatan kawasan parkir.

Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh Barat, merupakan salah satu dinas yang bertugas dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan penataan dan pembinaan transportasi masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Dishub menjalankan tugasnya berdasarkan keperluan Pemerintah Daerah dibawah tanggung jawab Bupati dan sekretaris daerah Aceh Barat. Dishub Aceh Barat memiliki tugas utama yang wajib dilaksanakan yaitu mengurus bidang transportasi atas dasar asas otonomi daerah. Salah tugas pokok dishub adalah dengan mengelola parkir ditepi umum, tujuannya adalah untuk dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan tersebut tentunya dapat berguna bagi daerah itu sendiri baik dalam segi pembangunan daerah maupun sebaliknya.

Pembangunan tersebut dapat dilihat dan diartikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktifitas sumber daya alam itu sendiri baik secara potensial maupun finansial. Dengan adanya pembangunan yang baru yang berasal dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu parkir maka dapat dikatakan daerah tersebut telah melakukan perubahan dari masa lampau ke masa sekarang (Siahaan, Kesek, 2012). Dengan demikian peran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat khususnya tentang Pelaksanaan Parkir yang mempunyai peran sangat penting dalam pengawasan yang akan membawa dampak positif dan negatif untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pentingnya peran Dishub Kabupaten Aceh Barat dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum sehingga dapat diketahui apakah peran Dishub dapat meningkatkan PAD di kota Meulaboh.

Dengan demikian peran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat khususnya tentang pelaksanaan parkir yang mempunyai peran sangat penting dalam pengawasan yang akan membawa dampak positif dan negatif untuk masyarakat, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kota Meulaboh”**

LANDASAN TEORI

Parkir

Menurut Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 parkir adalah kondisi dimana transportasi yang digunakan oleh seseorang tidak berjalan atau berhenti beberapa saat yang telah ditinggalkan oleh pengendaranya. Pada dasarnya pengendara akan dilarang untuk memarkirka kendaraanya (Wulandari, 2015). sedangkan Jalan umum artikan sebagai prasarana transportasi yang telah disediakan oleh pemerintah meliputi aspek yang dapat digunakan oleh masyarakat umum (Pandey V., 2016). Penyediaan prasarana jalan umum tentunya juga diperlukan tempat parkir sebagai agar pengendara yang dapat merasa nyaman dan aman saat meninggalkan kendaraanya. Menurut (Wiwin Nurzanah, 2019) penyediaan fasilitas dan penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum diperlukan perencanaan secara terbuka untuk melihat keselamatan lalu lintas, tata letak ruangan daerah, kemudahan penggunaan fasilitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan Parkiran

Pengelolaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan melalui perencanaan, pengarahan,

pengawasan dan mengorganisir segala bentuk sumber daya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan (Mannuhung et al., 2018). Menurut (Wulandari, 2015) Pengelola parkir diartikan sebagai bentuk aktivitas untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan berdasarkan ketentuan hukum melalui penerapan rambu petunjuk, informasi dan rambu larangan pada bidang perhubungan darat. (Imran, 2016) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa sarana kebijakan transportasi, yaitu:

1. Memelihara fungsi jalan umum sesuai dengan implementasinya.
2. Meningkatkan PAD melalui retribusi parkir.
3. Memperoleh efisiensi dan keselamatan lalu lintas
4. Melakukan pengendalian terhadap jumlah transportasi pada kawasan jalan umum.

Pengertian Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel (UU RI No 38 Tahun 2004).

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dilakukan melalui jenis penelitian kualitatif. Menurut (Rahmatillah & Hasanah, 2020), penelitian jenis kualitatif meninjau hasil berdasarkan deskriptif dan melalui pendekatan analisis yang induktif. Pendekatan yang dilakukan melalui sifat deskriptif, dimana penulis ingin melihat gambaran terkait peran Dishub Kab.Aceh Barat dalam mengelola parkir di tepi umum di Kota Meulaboh. Tempat dan sumber data yang diperoleh berasal dari Kantor Dishub Kab.Aceh Barat, melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara langsung bersama Kasubbag Perhubungan Darat, Kasi Sarana dan Prasarana, dan Pegawai pada Dinas Perhubungan Aceh Barat serta melakukan survei terhadap Juru Parkir wilayah Kota Meulaboh. Selain itu, data sekunder diperoleh dari website Dinas Perhubungan dan jurnal lainnya yang relevan terhadap penelitian yang dikaji.

Teknik pengumpulan data

Penggunaan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini melakukan wawancara secara langsung dengan Pembina Juru Parkir Kasi Sarana dan Prasarana dan juga kepada Kabid Sub Bagian Perhubungan Darat sebagai data primer dalam penelitian ini. Penelitian ini melakukan observasi/pengamatan dengan cara terjun secara langsung ke lapangan/lokasi penelitian salah satunya di Kota Meulaboh Jalan Nasional deretan Toko Modis untuk mengetahui dan mengamati seputar Juru Parkir Oleh Dishub Aceh Barat. Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi yang diberikan oleh instansi pada Kantor Dishub Aceh Barat yang terkait dengan pengelolaan parkir di tepi jalan umum.

Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan penelitian ini adalah 4 bulan, penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Perhubungan yang beralamat di Jalan Mereubo Kecamatan Mereubo Kabupaten Aceh Barat dan disisi jalan umum dalam Wilayah Kota Meulaboh salah satunya adalah di Jalan Nasional di deretan Toko Modis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Meulaboh

Pengelolaan parkir ditepi umum di Kota Meulaboh perlu untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen pengawasan guna terlaksanakannya tujuan parkir yang lebih objektif, aman dan tidak terjadinya macet. Pengelolaan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dishub Aceh Barat adalah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga (perorangan/perusahaan). Dishub perlu untuk merekrut jasa juru parkir untuk ditempatkan ke titik-titik kota yang diperlukan oleh masyarakat melalui perjanjian sesuai dasar hukum. Berikut ini merupakan target posisi dan jumlah juru parkir yang dibutuhkan untuk ditempatkan diberbagai titik wilayah kota Meulaboh.

Tabel 1. Target Posisi dan Jumlah Juru Parkir

NO	Lokasi Parkir	Jumlah Juru Parkir
1	Jalan Gajah Mada	9 Orang
2	Jalan Nasional	21 Orang
3	Jalan Iskandar Muda	4 Orang
4	Jalan Teuku Umar	10 Orang
5	Jalan Manek Roo	3 Orang
6	Jalan Singgah Mata	7 Orang
7	Jalan T. Chik Ali Akbar	3 Orang
8	Jalan Daud Dariyah	7 Orang
Total Juru Parkir		62 Orang

Berdasarkan Tabel 1. Diatas, terdapat 10 titik lokasi yang diprioritaskan untuk dikelola dan dilakukan pengawasan oleh Dishub Aceh Barat, sehingga dibutuhkan 62 orang jasa juru parkir yang akan ditempatkan ditepi jalan umum. Selain menempatkan juru parkir pada lokasi, Dishub juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi untuk membina juru parkir agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Retrebusi Penyeteroran Pengelolaan Parkir

Pada pengelolaan parkir di Kota Meulaboh perlu untuk menandatangani surat perjanjian kerja antara Dishub dan juru parkir dalam melaksanakan pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Meulaboh selama 12 bulan, hal ini dilakukan selain menertibkan transportasi diwilayahnya juga dapat meningkatkan PAD masyarakat Meulaboh melalui setor retribusi. Penyeteroran pemungutan retribusi di tepi jalan umum diatur pada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana Pihak kedua (Juru Parkir) diwajibkan untuk melakukan penyeteroran kepada Pihak Pertama (Dishub) setiap harinya sebesar Rp. 5.000, kecuali jika kondisi lapangan terkendala keadaan tertentu seperti hujan lebat, hari besar nasional dan keagamaan, serta pihak kedua dalam keadaan tidak bertugas karena sakit atau halangan penting lainnya, maka dari itu sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam pelayanan parkir.

Penyediaan Sarana dan Prasaran Pengelolaan Parkir

Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh juru parkir saat ini sangatlah bergantung pada sarana dan prasarana yang dimilikinya. Namun sarana dan prasarana di juru parkir kota Meulaboh saat ini masih belum maksimal, sehingga hal ini memberi dampak yang ketidakseriusan juru parkir dalam menjalankan tugasnya dan berdampak rendahnya PAD yang dihasilkan. Hal ini menuntut Dishub Aceh Barat untuk memperhatikan fasilitas yang harus

disediakan bagi juru parkir agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berikut ini adalah usulan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh juru parkir.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Juru Parkir

Fasilitas	Usulan Kebutuhan
Sarana	1) Baju Parkir/Rompi 2) Bet Nama
Prasarana	1) Fasilitas parkir

Berdasarkan Tabel 2. Diatas terdapat 2 sarana dan 1 prasarana yang dibutuhkan oleh juru parkir di kota Meulaboh untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sarana dan prasarana yang fasilitasi diharapkan akan memberi keamanan, layanan tempat, serta kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jasa juru parkir agar tidak di diskriminatif dan dapat diperlakukan dengan bijak oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam di Kota Meulaboh maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peran dinas perhubungan dalam pengelolaan parkir sudah berjalan dengan baik, namun belum adanya kerjasama yang mendalam pada jasa juru parkir. karena bisa kita lihat dalam pemungutan parkir dilapangan masih belum sesuai dengan peraturan dimana juru parkir meminta lebih kepada pengguna jasa dari tempat parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 dengan membayar restribusi parkir sebesar Rp.2000 yang seharusnya dalam peraturan daerah hanya membayar Rp.1000, sehingga juru parkir banyak mendapatkan keuntungan. Menurut pengamatan penulis, target PAD dari potensi pemungutan parkir dapat ditentukan lebih besar walaupun selama ini target PAD yang diberikan kepada DISHUB dapat dicapai 100%. Hasil pengelolaan dan pengawasan, dibentuk 8 titik daerah Kota Meulaboh untuk menempati mengelola parkir ditepi umum dengan 62 juru parkir. Hal ini dilakukan untuk agar pengelolaan transportasi di wilayah Kota Meulaboh dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu sarana dan prasarana diusulkan sebagai bentuk penyediaan fasilitas bagi juru parkir yaitu baju parkir/rompi, bet nama, dan fasilitas parkir.

Saran

Oleh karena besarnya potensi parkir dilapangan dan kurang tertibnya petugas parkir dalam memungut dan menyetorkan pemungutan parkir maka menurut hemat penulis perlu untuk di lakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pentingnya penyusunan peraturan Bupati tentang penyelenggaraan perparkiran yang dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat, pedagang atau pemilik bangunan/toko ditepi jalan umum, petugas parkir dan pihak-pihak dari instansi pemerintah. Dan pentingnya perhitungan ulang potensi parkir dengan besaran yang dapat menguntungkan daerah.
2. Pentingnya pembinaan bagi pengelola parkir dan juru parkir oleh dinas perhubungan. Dan pentingnya pembuatan untuk penggunaan parkir elektronik pada tempat-tempat khusus seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan pusat-pusat keramaian lainnya seperti contoh nya pemasangan cctv.

DAFTAR REFERENSI

- Hidayat, A., & Machali, I. (2012). Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola sekolah dan Madrasah). *Universitas Pendidikan Indonesia*, 4–6.
- Imran, A. A. (2016). Implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi Jalan Umum Gajah Mada oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *Administrasi Negara*, 4(2), 2809–2822. [https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/05/An_Ejurnal_Imran\(05-18-16-09-07-27\).pdf](https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/05/An_Ejurnal_Imran(05-18-16-09-07-27).pdf)
- Mannuhung, S., Tenrigau, A. M., & D, D. (2018). *MANAJEMEN PENGELOLAAN MASJID DAN REMAJA MASJID DI KOTA PALOPO*. 1(1), 14–21.
- Nurhasanah. (2017). ANALYSIS OF PERFORMANCE OPERATIONAL CONTROL SECTOR (DALOPS) IN DUMAI CITY TRANSPORTATION DEPARTMENT. *JOM FISIP*, 4(2), 1–15.
- Pandey V., S. (2016). Pentingnya Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Sebagai Upaya Membangun Desa Di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. *Tekno*, 14(66).
- Pribadiono, A. (2016). Transportasi Online Vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara On Line. *Lex Jurnalica*, 13(2), 126–138. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1540/1404>
- Rahmatillah, N., & Hasanah, U. (2020). STRATEGI PEMASARAN PRODUK-PRODUK GADAI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 1(I), 16–31.
- Siahaan, Kesek, F. (2012). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Journal EMBA*, 1(4), 1922–1933, ISSN 2303-1174.
- Wiwin Nurzanah, I. D. A. (2019). Studi Aksesibilitas Transportasi Berkelanjutan Untuk Penyandang Cacat (Disabilitas) Di Pusat Kota Medan. *Saintek ITM*, 31(2), 50–63. <https://doi.org/10.37369/si.v31i2.35>
- Wulandari, S. (2015). Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 35–46. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id